

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. Vol.XXI No.1. Hal 1-9.
- Aulia, Sitta. 2012. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*. Vol.2 No.1. Hal 204-216.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2018. Angka Partisipasi KAssar (APK). Diakses dari <http://sirusa.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. 2018. Keadaan Geografis dan Iklim. Diakses dari <http://muaraenimkab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas. 2016. Bayanknya Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kab. Musi Rawas 2014. Diakses dari <http://musirawaskab.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu . 2017. Banyaknya Desa, Kelurahan, Dusun, RW, dan RT Menurut Kecamatan di Kab. Belu 2015. Diakses dari <http://belukab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2017. Statistik Daerah Kutai Barat 2017. Diakses dari <http://kubarkab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan. 2016. Statistik Daerah Banggai Kepulauan 2016. Diakses dari <http://banggaikab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali. 2016. *Population Data Series by Subdistrict in Morowali Regency 199-2015*. Diakses dari <http://morowalikab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. 2016. Kolaka Dalam Angka 2016. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka 2016. Diakses dari <http://kolakakab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. 2017. Statistik Daerah Kabupaten Mamuju 2017. Diakses dari <http://mamujukab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula. 2017. Kepulauan Sula Dalam Angka 2017. Diakses dari <http://kepsulkab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe. 2013. Pembagian Daerah Administrasi Kab. Konawe 2013. Diakses dari <http://konawekab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari. 2015. Kabupaten Manokwari dalam Angka 2016. Diakses dari <http://manokwarikab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. 2015. Sosial dan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu 2016. Diakses dari <http://labuhanbatukab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2017. Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2017. Diakses dari <http://jabar.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias. 2017. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Nias. Diakses dari <http://niaskab.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2016. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2010, 2014, 2015. Diakses dari <http://lampung.bps.go.id>. Pada tanggal 20 Mei 2018.

Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Berlian, Nur VA. 2011. Faktor-faktor Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 17 No.1.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta. UII Press.

Ferina, Ika Sasti, et al. 2015. Pengaruh Belanja Pendidikan, Ekonomi, dan Pelayanan Umum Terhadap Partisipasi Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan. *Majalah Ilmiah Sriwijaya*. Vol XX No.12.

Fitriani, F. 2005. *Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia*. World Bank.

- Ghozali, Imam. 2006. *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Haji, Adha Primadaya., T. Sutrisno., dan Nurkholis. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Provinsi (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara). International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG). Vol 1 No.2.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang. UMM Press
- Haryanti, Dini., M. Marheni., dan Y. Yenfi. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (SIABK). Vol 10 No.2.
- Jambi Ekspress. 2012. Sangketa Aset Daerah Pemekaran. <http://jambiekspres.co.id>. Pada 7 Juli 2018.
- Kamaroellah, R.Agoes. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Nuansa. Vol 14 No.1.
- Kemendagri. 2017. Pemekaran Daerah Dinilai Belum Memungkinkan. Diakses dari <http://kemendagri.go.id>. Pada 10 Juni 2018.
- Kusuma, Aditya Perdana. 2014. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Setelah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sukoharjo.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi

- Mariani, Lidia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mengkuningtyas, Yeni dan Adib, Noval. 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemekaran. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol.4 No.1
- Mianti, Rara. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
- Moenir, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Multasih. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS). Vol 4 No.1.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nasution, Inom. 2010. Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan. Jurnal Visipena. Vol.1 No.2.
- Oktavianus, Donny., Murni Sri., dan Saraeng Ivones. 2015. Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon Periode Anggaran 2010-2014. Jurnal EMBA. Vol 3 No.3.
- Prihatiningsih, Ana. 2010. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta. Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Data APK dan APM KEMDIKBUD. Diakses dari <http://apkpm.data.kemdikbud.go.id>. Pada tanggal 20 Februari 2018.
- Purusa, Mahocca Swangga, dan Sasana, Hadi. 2013. Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap AKABA dan APM SD/MI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010. Diponegoro Journal of Economics. Vol.2 No.1.

- Ramadhini. 2015. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja PPK-BLUD RSUD PERMENKES Nomor: 209/SK/2011 Versus Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-34/PB/2014.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsoh. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.

Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP). Vol 2 No.1.

Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Setiaji, Wawan, dan Adi, Priyo Hari. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar.

Sistem Informasi Rujukan Statisitik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. [www.sirusa.bps.go.id](http://www.sirusa.bps.go.id). 15 Maret2018.

Sinambela, Litjan Poltak dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi aksara

Sucandrawati, Ni Komang Ayu. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Sebelum dan Sesudah Pemekaran. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Sulistyawan, Andri. 2013. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2012. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Supriyadi, Ujang Didi. 2009. Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar terhadap Kualitas Pendidikan di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Jurnal Kependidikan. Vol.39 No.1.

Susantih, Heny dan Saftiana. 2012. Perbandingan Indokator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung. Alfabeta.

Susiati, Reni., Sari Syarifah Ratih Kartika., dan Yudhawijaya. 2017. Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah pada Provinsi

Jawa Timur dan Jawa Tengah (Periode Anggaran 2010-2015).  
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Akuntansi. Vol 6 No.1.

Towa, Maria Fransiska Wist. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Sebelum dan Sesudah Pemekaran. Jurnal Riset Manajemen. Vol 1 No.2.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yamin, Moh., Suyidno. 2014. Kajian Tentang Faktor Penyebab Rendahnya Ketercapaian APM dan APK Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar. Balitbangda Kalimantan Selatan.

